

## ATUR CARA

HARI PERTAMA (SELASA) 12 OKTOBER 2010	PROGRAM
8.30 pg – 9.00 pg	Pendaftaran (Dataran FSSK)
9.00 pg – 9.15 pg	Ketibaan Perasmi, Naib Canselor dan Dif-dif Kehormat
9.15 pg – 10.00 pg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ucapan Pengarah Seminar Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim</li> <li>• Ucapan Rektor UI YBhg. Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Sumantri</li> <li>• Ucapan Naib Canselor UKM YBhg. Prof. Tan Sri Dato' Dr. Sharifah Hapsah binti Syed Hasan Shahabudin</li> <li>• Ucapan Perasmi, Pengerusi Eksekutif, Utusan Melayu (M) Bhd. YBhg. Tan Sri Mohamed Hashim Ahmad Makaruddin</li> </ul>
10.00 pg – 10.30 pg	Jamuan Perasmian (Bankuasi dan Restoran Seri Menanti)
10.30 pg – 11.00 pg	<b>Ucap Utama 1</b> YBhg. Prof. Dr. Bachtiar Ali, Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP, UI
11.00pg – 11.30 pg	<b>Ucap Utama 2</b> YBhg. Prof. Dr. Samsudin A. Rahim, Profesor Komunikasi, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, FSSK, UKM
11.30 pg – 12.45 tgh	<b>Sesi Selari 1 (8 sesi) BK 3A.501 – BK 3A.508</b>
12.45 tgh – 2.15 ptg	Jamuan Tengah Hari (Bankuasi dan Restoran Seri Menanti)
2.15 ptg – 3.30 ptg	<b>Sesi Selari 2 (8 sesi) BK 3A.501 – BK 3A.508</b>
3.30 ptg – 4.00 ptg	Jamuan Petang (Dataran FSSK)
4.00 ptg – 5.30 ptg	<b>Sesi Selari 3 (8 sesi) BK 3A.501 – BK 3A.508</b>
5.30 ptg – 8.00 mlm	Rehat
8.00 mlm – 10.30 mlm	Majlis Makan Malam (Dewan Tun Abdullah Mohd Salleh)
<b>HARI KEDUA (RABU) 13 OKTOBER 2010</b>	
8.30 pg – 10.00 pg	<b>Sesi Selari 4 (8 sesi) BK 3A.501 – BK 3A.508</b>
10.00 pg – 10.30 pg	Jamuan Ringan (Dataran FSSK)
10.30 pg – 11.45 pg	<b>Sesi Selari 5 (8 sesi) BK 3A.501 – BK 3A.508</b>
11.45 pg – 1.00 ptg	<b>Sesi Selari 6 (8 sesi) BK 3A.501 – BK 3A.508</b>
1.00 ptg – 2.15 ptg	Jamuan Tengah Hari (Restoran Seri Menanti dan Dataran Canselori)
2.15 ptg – 5.00 ptg 3.00 ptg – 5.00 ptg	<b>FORUM “Kerjasama Dua Hala Malaysia-Indonesia” (Sesi terbuka)</b> <b>SIDANG MEJA BULAT “Penyelidikan Hubungan Indonesia-Malaysia” (Sesi Tertutup)</b>
5.00 ptg – 5.10 ptg	Ucapan oleh Dekan FISIP, UI YBhg. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono
5.10 ptg – 5.30 ptg	Upacara Penutup oleh Dekan FSSK YBhg. Prof. Dr. Sharifah Mastura Syed Abdullah
5.30 ptg	Jamuan Ringan (Restoran Seri Menanti & Dataran Canselori) Seminar tamat

**SESI 1D (11.30 PAGI – 12.45 TENGAH HARI)****TEMPAT: 3A 504****TEMA : SAINS KESIHATAN DAN PERSEKITARAN (1)**

Pembentang	Tajuk
<b>Pengerusi: Fauziah Che Leh</b>	
Fauziah Che Leh	Rawatan Kesihatan Menggunakan Kolam Air Panas: Satu Pengalaman Pengamal Kaedah Tradisional di Negeri Perak
Er Ah Choy, Asmahani Atan, Zainudin Mohd Ali & Mazrura Sahani	Analisis Sosioekonomi dan Kadar Insidens Penyakit Denggi di Daerah Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Agus Aris Munandar	Situs Lembah Bujang, Kedah dan Situs Batujaya, Karawang: Tinjauan Arkeologis Terhadap Akar Kebudayaan Serumpun
Zaini Sakawi, Sharifah Mastura Syed Abdullah, Othman Jaafar & Mastura Mahmud	Analisis Konsentrasi Bau Menggunakan Odour Concentration Meter Sekitar Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Ampar Tenang, Sepang, Selangor
Dwita Sutjningsih Evi Anggraheni	Efektifitas Situ Baru di Depok, Jawa Barat, Indonesia Sebagai <i>Stabilization Pond</i>

**SESI 1E (11.30 PAGI – 12.45 TENGAH HARI)****TEMPAT: 3 A 505****TEMA : GENDER DAN PEMBANGUNAN INSAN (1)**

Pembentang	Tajuk
<b>Pengerusi: Aishah@Eshah Haji Mohamed</b>	
Aishah@Eshah Haji Mohamed & Fatimah Yusoff	Wanita Dan Hiv / Aids: Punca Jangkitan
Maizatul Azura Yahya, Nasariah Mansor & Ainal Akmar Ahmad	Kesantunan Bahasa dalam Kalangan Remaja: Satu Perbandingan Gender
Evelyn Suleeman	The Role of Women In Hygiene Practice a Case Of West Aceh
Vinita Susanti	Kebijakan yang Diskriminatif Gender (Studi Terhadap Siswi Hamil Di Sma Dki Jakarta)
Vieronica Varbi Sununianti	Persepsi, Mahasiswa dan Kepimpinan Perempuan

**SESI 1F (11.30 PAGI– 12.45 TENGAH HARI)****TEMPAT: 3 A 506****TEMA : PSIKOLOGI, PENDIDIKAN, FALSAFAH DAN PERADABAN (1)**

Pembentang	Tajuk
<b>Pengerusi: Husain Heriyanto</b>	
Husain Heriyanto	The Re-Enchantment of Nature: The Importance of Realist-Ecology Philosophy for Civilization Today
Kamarudin Ismail	Isu Buli di Sekolah: Antara Realiti dan Cabaran
Dwi Amalina Chandra Sekar, Djoemeliarasanti & Fitriyah, M	Bullying dt School: Facts, Prevention dnd Its Constraints
Nik Noralhuda Nik Mohamed & Nor Hasnida Che Mad Ghazali	Pengetahuan Konseptual dan Prosedural dalam Pendidikan Matematik



## PERSEPSI, MAHASISWA DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Vieronica Varbi Sununianti  
Universitas Sriwijaya, Palembang

Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat sedikit jumlahnya, hal ini karena kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke ruang publik dan juga adanya pandangan *stereotype* yang turut merendahkan perempuan. Pola pikir mahasiswa yang merupakan tolak ukur kemajuan bangsa mendorong peneliti untuk mengetahui persepsinya mengenai kepemimpinan perempuan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Tujuan penulisan untuk mendeskripsikan persepsi generasi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsinya. Manfaat teoritis penulisan sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan di bidang sosiologi dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan sosial. Manfaat praktisnya diharapkan hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan/isu perempuan serta membantu para perempuan agar lebih terbuka pemikirannya untuk memperjuangkan haknya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Lokasi penelitian berada di empat Perguruan Tinggi Swasta yakni STIE Musi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma dan Universitas Tridinanti Palembang dengan informan adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta minimal semester empat dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan universitas. Pengumpulan data menggunakan *indepth interview*. *Guided interview* digunakan untuk mempermudah pengumpulan data. Proses analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil di lapangan ditemukan bahwa persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif lebih baik dalam kerjasama, berdiskusi, berkoordinasi, melayani, membimbing, perhatian, pengawasan, kerja lebih efektif, lebih peka pada keadaan/lingkungan yang terjadi serta lebih dapat berlaku adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi diantaranya faktor pemersepsi yang meliputi minat/kepentingan, pengalaman dan harapan; faktor objek dan faktor situasi sosial.

## KEBIJAKAN YG DISKRIMINATIF GENDER (STUDI TERHADAP SISWI HAMIL DI SMA DKI JAKARTA)

Vinita Susanti  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia.

Hasil penelitian ini, mendeskripsikan bagaimana kebijakan di Sekolah Menengah Umum (SMU) terhadap siswinya yang hamil. Ada 2 bentuk kebijakan yang berlaku, yakni: tertulis dan tidak tertulis. Implementasinya, sangat tergantung pada nilai, norma dan lingkungan sekolah. Untuk kebijakan tertulis secara garis besar memiliki keragaman, kemiripan dan kesamaan, terutama dalam format, rumusan, dan isinya. Kebijakan tidak tertulis, penanganannya mencakup berbagai aspek: tahap penafsiran, pelaksanaan, variasi kasus kehamilan, dan penanganan yang lazim di sekolah. Pada umumnya, kebijakan sekolah terhadap siswinya yang hamil, sangat diskriminatif, yakni tidak responsif gender, siswi dilarang melanjutkan pendidikannya.

# PERSEPSI MAHASISWA DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN<sup>1</sup>

**Vieronica Varbi Sununianti**

*Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang*  
vieronica.unsri@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*Kepemimpinan perempuan sedikit jumlahnya, hal ini karena kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke ruang publik dan juga adanya pandangan stereotype yang turut merendahkan perempuan. Pola pikir mahasiswa yang merupakan tolak ukur kemajuan bangsa mendorong peneliti untuk mengetahui persepsinya mengenai kepemimpinan perempuan. Tulisan ini membahas bagaimanakah persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Tujuan penulisan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsinya. Manfaat teoritis penulisan sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan di bidang sosiologi dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan sosial. Manfaat praktisnya diharapkan hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan/isu perempuan serta membantu para perempuan agar lebih terbuka pemikirannya untuk memperjuangkan haknya.*

*Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Lokasi penelitian berada di STIE Musi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma, dan Universitas Tridnanti Palembang dengan informan adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta minimal semester empat dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan universitas. Pengumpulan data menggunakan indepth interview. Guided interview digunakan untuk mempermudah pengumpulan data. Proses analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Diketahui bahwa persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif lebih baik dalam kerjasama, berdiskusi, berkoordinasi, melayani, membimbing, perhatian, pengawasan, kerja lebih efektif, lebih peka pada keadaan/lingkungan yang terjadi serta lebih dapat berlaku adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi diantaranya faktor pemersepsi yang meliputi minat/kepentingan, pengalaman, dan harapan; faktor objek dan faktor situasi sosial.*

*Kata Kunci : Persepsi, Mahasiswa dan Kepemimpinan Perempuan*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini bersumber dari sebagian Skripsi penulis yang berjudul "Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Studi Mahasiswa di PTS Kota Palembang)". Makalah ini dibuat untuk dipresentasikan pada Seminar Internasional, Sebumi 3 kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia, 12-13 Oktober 2010 di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

## **PENDAHULUAN**

Kepemimpinan laki-laki cenderung lebih diterima dalam masyarakat daripada perempuan. Hal ini terlihat dari terpilihnya sepuluh orang perempuan atau 15,4 persen dari 65 orang pada pemilu 2004 di parlemen Sumatera Selatan (Sumsel) padahal target yang ditentukan sebesar 30 persen (Sartika, 2007:10). Selain itu, sampai saat ini minimnya jumlah politisi perempuan dari hampir semua lembaga pengambil keputusan juga diungkapkan oleh Ani Widyani Soetjipto.

Kesempatan perempuan sebagai pemimpin di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menduduki jabatan tersebut relatif lebih kecil kemungkinannya untuk diperoleh perempuan dibandingkan kesempatan yang didapat laki-laki. Contohnya saja jumlah anggota legislatif pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla untuk perempuan ternyata hanya terisi 11 persen. Padahal dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap partai politik (parpol) peserta pemilu dapat mengajukan anggota legislatif tingkat pusat (DPR), daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Persentase kedudukan perempuan di Lembaga Legislatif. Anggota DPRD provinsi Sumsel tahun 2005 berdasarkan persentase jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan, sebanyak 55 orang dan 10 orang perempuan (Selayang Pandang DPRD Sumsel. 2006 : 29). Pegawai yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel hanya empat (4) orang atau 23,53 persen perempuan dari 17 orang pejabat eselon. Sementara itu, kondisi yang serupa juga terjadi pada Lembaga Legislatif atau DPRD Kota Palembang. Susunan pimpinan dan keanggotaan Komisi-komisi DPRD kota Palembang periode 2007 – 2008 ternyata hanya ada dua orang perempuan, yakni Dede Suginingsih dari Fraksi Golkar dan Hj. Sunnah NBU, SH, MH dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palembang adalah 45 orang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa walaupun perempuan masih sedikit yang menjabat sebagai pemimpin tetapi setidaknya ada perwakilan dari perempuan yang artinya perempuan pun patut diperhitungkan.

Kepemimpinan perempuan di Lembaga Yudikatif. Pada badan Yudikatif tingkat Kota Palembang pun mengalami hal yang serupa. Jumlah hakim laki-laki lebih banyak daripada jumlah hakim perempuan, yakni 11 orang hakim laki-laki atau sekitar 78, 57 persen berbanding 2 orang hakim perempuan atau 14, 29 persen.

Jika perempuan sebagai pemimpin, tidak sedikit pula berapa hambatan yang turut menyertainya. Selama ini hambatan tersebut dikarenakan pandangan *stereotype* (pelabelan) yang sering kali bersifat negatif dan secara umum selalu menimbulkan ketidakadilan (Satria, 2003:6). Contohnya, label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan jika mereka hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti kegiatan politik, bisnis, maupun birokrasi. Selain itu, pada tingkat subordinasi juga sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, dalam hal pembagian pekerjaan atau sejak tahap *recruitmen*. Perempuan ditempatkan pada bidang-bidang yang dianggap tidak memerlukan kepandaian dan kecakapan. Umumnya mendapat pekerjaan di bidang kesekretariatan, logistik, pemasaran yang menuntut keelokan paras tubuh. Oleh karena itu, penelitian tentang persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan khususnya di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menarik untuk diteliti.

## **PERMASALAHAN**

Keterlibatan perempuan di bidang kepemimpinan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena masih ada yang pro dan kontra berbagai pihak terkait, mulai dari KPU, pengamat dan politikus, parpol, LSM, dan juga dari aktivis perempuan sendiri. Seiring dengan gencarnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender maka perlu ada kajian yang khusus melihat tentang bagaimana persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan. Permasalahan yang akan dibahas yakni, pertama, bagaimanakah persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif?

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa di perkotaan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi, pengetahuan, dan wawasan di bidang sosiologi khususnya mengenai sosiologi gender dan sosiologi politik pada masyarakat. Disamping itu juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, khususnya yang terkait dengan masalah ini. Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan/isu perempuan terlebih dalam hal kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dan juga diharapkan dapat membantu para perempuan agar lebih terbuka pikirannya untuk memperjuangkan haknya.

## **KERANGKA TEORI**

Perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki, inilah anggapan umum yang berlaku sekarang ini tentang kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat. Anggapan ini tercermin dalam prasangka-prasangka umum, seperti "seorang istri harus melayani suami". Tapi anggapan ini adalah anggapan yang keliru.

Penempatan perempuan pada posisi kelas dua dalam masyarakat berawal dari tergesernya peranan kaum perempuan dalam lapangan produksi. Selanjutnya pergeseran peran terjadi akibat tingkat teknologi yang tidak memungkinkan kaum perempuan memasuki lapangan produksi. Posisi kelas dua ini diperkukuh oleh sistem kepemilikan pribadi yang memunculkan berbagai prasangka, sistem nilai dan ideologi yang menegaskan paham keunggulan laki-laki dari perempuan.

Pilihan menjadi wanita karir telah menjadi fenomena bagi sebagian wanita. Permasalahan wanita karir bukan lagi terletak pada apakah dia harus memilih menjadi wanita karir saja atau menjadi ibu rumah tangga saja. Kini, permasalahannya yang lebih aktual untuk dijawab adalah bagaimana peran sebagai ibu rumah tangga tetap dijalankan secara optimal ketika seorang wanita memutuskan

untuk membina karir, terlebih bila posisinya sebagai pimpinan pada suatu instansi atau organisasi.

Menurut Abu Ahmadi, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Sedangkan, menurut George R. Terry, "*Leadership is the relationship in which one person, or the leader, influences others to work together willingly on related task to attain that which the leader desire*".

Kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi pihak lain berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Max Weber bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekumpulan orang untuk mewujudkan kehendak mereka dalam suatu tindakan komunal bahkan jika tindakan itu ditujukan untuk mengatasi perlawanan pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu (Weber, 2009:217). Dan persyaratan utama calon pemimpin ialah dapat memimpin orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi dan dapat menjalin komunikasi antar-manusia karena organisasi selalu bergerak atas dasar interaksi antar-manusia.

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin menurut pandangan Soerjono Soekanto (2002:294–295) adalah :

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya, dengan adanya kerangka pokok tersebut maka dapat disusun skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan maka kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif berdasarkan fakta-fakta dan didasari oleh induktif analitik. Lokasi



penelitian dilaksanakan di empat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi (STIE Musi), Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Universitas Bina Darma (UBD) dan Universitas Tridinanti Palembang (UTP). Adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan universitas tersebut termasuk perguruan tinggi favorit serta memiliki beberapa unit organisasi kemahasiswaan sebagai pengembangan diri mahasiswanya.

Berdasarkan tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena untuk mengumpulkan data, peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Adapun yang dikategorikan sebagai informan adalah mahasiswa S-1 dari keempat PTS di atas, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan serta aktif dan berkedudukan sebagai pengurus dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan kategori minimal semester empat dengan maksud mahasiswa yang bersangkutan telah mengenal sistem belajar di perguruan tinggi.

Jenis data yang diperoleh di sini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kesepuluh informan melalui wawancara. Data sekunder berupa data penunjang di luar data primer yang digunakan dalam penelitian, diperoleh melalui studi pustaka; melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti: buku metode penelitian, buku mengenai kepemimpinan, perempuan dan generasi muda; surat kabar *Kompas*, internet serta monografi kota Palembang.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan pada kelompok yaitu generasi muda terdidik di kota Palembang khususnya mahasiswa. Interpretasi data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Sifat dari analisis deskriptif kualitatif bukan untuk menggeneralisasi dari data yang didapat tetapi hanya untuk menggambarkan varian-varian dalam kerangka holistik dari realitas sosial mengenai kepemimpinan perempuan.

Analisis dari kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan proses analisis. Ketiga kegiatan

tersebut saling berkaitan dengan berlangsung terus menerus, mulai sebelum, saat, dan sesudah pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Eksekutif**

Lembaga Eksekutif adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan perundang-undangan. Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Dalam hal pertanggungjawaban, Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Presiden Republik Indonesia selain bertugas sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara.

### **Lembaga Legislatif**

Lembaga Legislatif adalah lembaga yang membuat atau mengeluarkan UU negara yang berdasar kedaulatan rakyat. Adapun keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui Pemilu dan memegang kekuasaan Legislatif. Secara khusus tugas dan fungsi DPR antara lain (Budiyanto, 2003) memegang kekuasaan membentuk UU, membahas dan menyetujui bersama rancangan UU yang diajukan oleh Presiden, disamping itu DPR juga mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan.

### **Kuota 30% Bagi Perempuan di Parlemen**

Strategi pemerintah untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan yakni pengarusutamaan gender (PUG), salah satunya adalah kebijakan

“kuota 30% perempuan”. Dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bab I Pasal 8 ayat 1 (d) yang menyatakan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kebijakan ini tentunya merupakan terobosan penting dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan publik.

Dalam pelaksanaannya terjadi perdebatan kuota yang bersifat anti *equal opportunity*, tidak demokratis, tidak berdasarkan kualitas, tidak cukup jumlah perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, bahkan hingga menimbulkan konflik antar laki-laki dan perempuan (Soetjipto, 2005:35). Sebaliknya mereka yang setuju dengan kebijakan kuota 30% bagi perempuan di parlemen menganggap kuota adalah cara untuk mengejar ketinggalan dan tidak terwakilinya perempuan dalam lembaga negara dan organisasi politik

### **Lembaga Yudikatif**

Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka atau lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Lembaga Yudikatif adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan fungsi dan pelaksanaan keadilan (kehakiman). Adapun ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

### **Kemampuan Pemimpin Perempuan dalam Berkomunikasi**

Syarat pemimpin merupakan hal yang penting untuk diketahui, menurut O. Jeff Harris, syarat calon pemimpin harus memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menjadi perseptif, kemampuan untuk menanggapi secara objektif, kemampuan menetapkan prioritas secara tepat serta kemampuan untuk berkomunikasi. Selanjutnya tanggung jawab seorang pemimpin menurut, M. Nur Budiyanto adalah mampu memberikan jawaban secara arief,

efektif, dan produktif atas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi zamannya yang dilakukan bersama dengan orang-orang yang dipimpinya.

Kemampuan adalah segenap daya, kesanggupan, kekayaan, dan kekuatan yang terdapat pada individu untuk bertingkah laku (Kartono, 1994:190), khususnya dalam hal ini untuk bertingkah laku sebagai pemimpin di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, salah satu unsurnya adalah kemampuan berkomunikasi pemimpin dengan lingkungan sekitarnya. Pandainya seseorang bergaul didukung oleh caranya berkomunikasi, dengan demikian *human relation*-nya pun akan baik. Adapun yang dimaksud komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pemimpin harus dapat bergaul dalam lingkungan yang kondusif sehingga dapat menjadi orang yang matang secara kepribadian.

Kemampuan berkomunikasi merupakan yang hal tak bisa dihindarkan bagi kepemimpinan perempuan karena dengan komunikasi yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula bagi organisasi. Kinerja yang baik akan menghasilkan suatu bentuk saling kerjasama, menghargai, melayani, dan membantu. Namun komunikasi yang kurang baik, menurut tiga informan, seperti tidak tegas dalam mengambil keputusan akan menyebabkan kekurangan bagi kepemimpinan perempuan itu sendiri. Kerjasama, saling menghargai, melayani, dan membantu hanya akan tercapai jika dua orang saling merespon dan karena dengan komunikasi bisa menciptakan rasa saling memahami dan tahu dengan lingkungan sekitar. Mengenai persepsi informan tentang kepemimpinan perempuan dalam menjalin kerjasama, saling menghargai, membantu bawahan tidak dipengaruhi oleh jurusan bidang studi yang ditempuh oleh informan begitu pula dengan latar belakang pekerjaan orang tua mereka.

### **Kemampuan Pemimpin Perempuan di Bidang Pengetahuan**

Seorang pemimpin selayaknya memiliki informasi, pengetahuan, serta pengalaman yang luas dan lebih banyak. Seorang pemimpin harus dapat mengembangkan kemampuan akademiknya secara optimal sehingga dia dapat

menjadi orang yang matang secara intelektual. Dalam UU No 10 Tahun 2008 mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 50 ayat 1 (e) menyatakan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan tanggapan mengenai kemampuan pemimpin perempuan di bidang pendidikan, mayoritas informan (70%) mengatakan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang untuk mampu memimpin organisasi. Jadi, dalam melihat kepemimpinan perempuan, informan tidak terpaku pada tingkat pendidikan yang ditamatkan namun juga perlu dilihat dari segi wawasan yang luas, kemampuan berpikir, kemampuan bekerjasama, kemampuan membimbing bawahan, pengalaman, dan *skill* yang dimiliki. Hal ini merupakan suatu langkah baik, mengingat tidak semua orang dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi namun mempunyai keahlian di bidang lain tetap memiliki peluang untuk menjadi pemimpin. Jadi, proses belajar yang dilakukan oleh individu juga dipengaruhi oleh aspirasi yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Bagi perempuan yang memang memiliki aspirasi untuk meraih prestasi sebaik-baiknya, tentunya akan mendorong lebih aktif mengikuti kegiatan belajar.

### **Kemampuan Pemimpin Perempuan dalam Memanajemen Organisasi**

Kepemimpinan erat sekali kaitannya dengan manajemen. Manajemen merupakan usaha sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen adalah aktivitas dalam organisasi yang terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran) suatu organisasi dan sarana-sarana yang dapat dicapai secara efektif (Morell dikutip Kartono, 2002:71).

Dari hasil interview diketahui bahwa keempat informan menyatakan bahwa kemampuan pemimpin perempuan dalam memanajemen organisasi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dianggap lebih baik bila dibandingkan dengan laki-laki. Diketahui juga bahwa ada beberapa hal yang membuat manajemen kepemimpinan perempuan dapat berjalan dengan baik, diantaranya karena



perempuan mempunyai sifat yang lebih sabar, rapih dalam bekerja, terencana dalam melakukan kegiatan, pandai *me-lobby*, peka terhadap lingkungan, lebih teliti, serta lebih menggunakan logika. Berkaitan dengan kemampuan pemimpin perempuan dalam melihat setiap permasalahan organisasi sebagai suatu keseluruhan, bisa dilihat bahwa latar belakang pengalaman informan turut mempengaruhi persepsinya. Namun tidak dengan latar belakang pekerjaan orang tua, jurusan program studi yang ditempuh, tingkat semester, jenis organisasi, dan tempat menempuh pendidikan tinggi.

### **Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif**

Kedelapan informan menanggapi bahwa kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif dalam melaksanakan kebijakan lebih banyak menggunakan kemampuan berkomunikasi. Guna mempermudah pelaksanaan suatu kebijakan, perempuan lebih menggunakan kemampuan seperti: berdiskusi, membimbing anggota, berkoordinasi termasuk juga mendekati diri dengan masyarakat. Adapun ini dikarenakan informan dipengaruhi oleh latar belakang mereka mengikuti organisasi kemahasiswaan yang tanpa membedakan jenis organisasinya itu sendiri.

Sedangkan kemampuan perempuan dalam memimpin di Lembaga Legislatif, perempuan dianggap lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian kebijakan yang dibuat pun lebih berpihak pada rakyat. Hal itu tentu tak dapat dilepaskan dari kemampuan perempuan dalam menjalin komunikasi.

Selanjutnya berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di Lembaga Yudikatif. Kemampuan pemimpin perempuan dapat terjadi pada siapa pun, termasuk pada tingkat yudikatif, hal ini bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kelebihan perempuan di Lembaga Yudikatif, menurut mayoritas informan (60%), pelaksanaan kerja yang lebih efektif, lebih bisa menjalin komunikasi guna menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama, lebih dapat berlaku adil serta lebih menghargai orang lain. Namun tidak dengan keempat informan, yang kesemuanya laki-laki yang menganggap bahwa perempuan kurang memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Sehingga, bisa dikaji bahwa jenis kelamin informan dalam hal ini turut

mempengaruhi persepsinya mengenai kemampuan perempuan di Lembaga Yudikatif terutama berkaitan dengan sikap tegas dan adil.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi**

Persepsi bersifat individual, hal ini dijelaskan oleh Robbins (dikutip Marhaeni, 2003:7) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membentuk persepsi yaitu faktor pemersepsi, objek, dan situasi. Faktor pemersepsi meliputi kepentingan/minat, pengalaman, dan harapan. Faktor objek meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang. Sedangkan faktor situasi yaitu unsur-unsur dalam situasi atau lingkungan terjadinya persepsi meliputi waktu, keadaan tempat, dan keadaan sosial.

Hasil interview menyimpulkan bahwa menurut kesepuluh informan faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi mereka mengenai kepemimpinan perempuan beraneka-ragam. Faktor pemersepsi yang terdiri dari minat atau kepentingan, pengalaman, dan harapan. Minat atau kepentingan informan terhadap kepemimpinan perempuan dari kedelapan informan yang diwawancarai membenarkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan nilai lebih bagi organisasi karena beberapa kemampuan yang dimilikinya. Faktor pengalaman memperhatikan kepemimpinan perempuan pun turut mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa karena ternyata kesemua informan yang diwawancarai juga membenarkan bahwa kebiasaan memperhatikan kepemimpinan perempuan selama ini mempengaruhi persepsi mereka mengenai perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Mengenai harapan, kedelapan informan menyatakan bahwa mereka mendukung atau berharap perempuan menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan karena menurut mereka kepemimpinan perempuan memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki.

Faktor objek yang dipersepsi yaitu kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang menjadi target yang akan diamati oleh pelaku persepsi yang memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya

faktor situasi yakni terjadinya persepsi mencakup waktu yang akan dipersepsi juga mempengaruhi persepsi mahasiswa.

Jadi, faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah faktor persepsi, objek, dan situasi. Sedangkan yang membedakannya adalah ada atau tidaknya minat atau kepentingan terhadap kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta ada atau tidaknya harapan informan terhadap kepemimpinan perempuan di lembaga tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa mayoritas informan sudah mengetahui maksud dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif, namun tidak dengan Lembaga Yudikatif. Kelebihan pemimpin perempuan seperti sifat melayani, menghargai, sabar, ramah, rapih dalam bekerja, bekerjasama, peka terhadap lingkungan, serta manajemen yang baik. Mengenai pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang untuk mampu memimpin organisasi, melainkan pada kemampuan berwawasan luas. Persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif lebih baik dalam bekerjasama, berdiskusi, berkoordinasi, melayani, membimbing, perhatian, pengawasan, kerja lebih efektif, lebih peka terhadap lingkungan yang terjadi serta lebih dapat berlaku adil.

Tiga faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yakni pemersepsi (yang dipengaruhi oleh minat/kepentingan, pengalaman dan harapan), objek (kepemimpinan perempuan), dan lingkungan sekitar. Faktor pemersepsi adalah faktor utama yang membedakan persepsi informan karena minat/kepentingan, pengalaman dan harapan informan yang berbeda.

Oleh karena itu berawal dari lingkungan keluarga hendaknya ditumbuhkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan guna menghindari diskriminasi gender dalam pekerjaan di ruang publik. Bagi pemerintah, hendaknya membuat

lebih banyak kebijakan/perda sebagai pedoman untuk menanggulangi masalah/isu perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto. (2003). *Tata Negara SMU*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Budiyanto, M. Nur. (2009). Dialog Teori Situasional dalam Sukses Kepemimpinan di Indonesia. *Percikan Pemikiran untuk Indonesia Baru, Bagian Pertama*:173–195.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2006). *Selayang Pandang DPRD Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- Kartono, Kartini. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Sartika, Diana Dewi. (2007). *Peranan Politik Perempuan Dinamika Gerakan Feminisme di Parlemen*. Jakarta : Elmatera Publishing.
- Satria, Yurni, dkk. (2003). *Modul Pengarusutamaan Gender*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto, Ani Widyani. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sununianti, Vieronica Varbi. (2008). *Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang)*. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Weber, Max. (1949). *Sosiologi*. Dialihbahasakan oleh Noorkholish, dkk. (2009) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.